

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN
KREDIT STUDI KASUS PADA PT. BANK BRI
(PERSERO) TBK UNIT DAENG SIRUA
MAKASSAR**

SKRIPSI

**KISRAWATI ASJUDALASTRI
NIM 105730450113**



**JURUAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT
STUDI KASUS PADA PT. BANK BRI (PERSERO)
TBK UNIT DAENG SIRUA
MAKASSAR**

SKRIPSI

**KISRAWATI ASJUDALASTRI
105730450113**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana
ekonomi pada jurusan akuntansi fakultas ekonomi & bisnis**

**JURUAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO HIDUP

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. (HR. Thabari & Daruquthni).

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain), dan berharaplah kepada tuhanmu. (QS Al Insyiroh 6-8).

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas Alva Edison).

PERSEMBAHAN

Untuk Kedua orang tua dan adik-adikku.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit
(Studi Kasus Pada Pt. Bank BRI (Persero) Tbk Unit
Daeng Sirua Makassar

Nama Mahasiswa : Kisrawati Asjudalastri

Stambuk : 10573 04501 13

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Selasa, 03 Juli 2018 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Juli 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. H. Ansyarif Khalid SE,MSi,Ak.CA
NIDN:0916096601

Pembimbing II

Sitti Zulaeha S.Pd.M,SI
NIDN:0919118704

Mengetahui



Ismail Rasulong, SE, MM
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.SI., Ak.CA
NBM :1073428




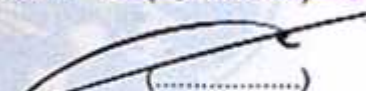


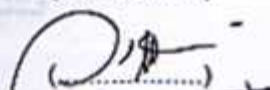

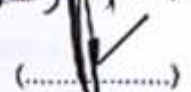
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Kisrawati Asjudalastri, Nim : 105730450113 , diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : , Tanggal 03 Juli / 2018, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Juli 2018

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr.H.Abd.Rahman Rahim,SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr.Agus Salim H R, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR. SE.,MM 
2. Ismail Badollahi,SE.,M.Si.,Ak.CA 
3. Faidhul Adzhim, SE.,M.SI 
4. Muttiarni SE.,M.Si 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM : 903078

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kisrawati asjudalastri

Stambuk : 105730450113

Jurusan : Akuntansi

Dengan judul : Efektivitas pengendalian internal pemberian kredit (Status kasus pada PT. Bank BRI (persero) Tbk Unit Daeng Sirua Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ketikan orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar

Makassar, 03 Agustus 2018



Diketahui oleh

Pembimbing I

Drs.H,Ansyarif Khalid SE, M.Si, Ak,Ca

pembimbing II

Sitti Zulaeha S.Pd M.Si

ABSTRAK

KISRAWATI ASJUDALASTRI, 2018. Efektivitas pengendalian internal pemberian kredit (studi kasus pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Unit Daeng Sirua Makassar). Drs. H. Ansyarif Khalid (pembimbing I), Sitti Zulaeha (Pembimbing II).

Keywords : Pengendalian internal, pemberian Kredit.

Pengendalian internal merupakan suatu sistem prosedural yang secara otomatis dapat saling memeriksa pencatatan antar satu bagian atau fungsi dalam suatu organisasi dan mengutamakan ketelitian dan administratif. Biasanya hal ini dilakukan dengan mempekerjakan dua orang atau lebih secara independen, untuk memperoleh kebenaran angka atau hasil yang sama.

Pemberian kredit merupakan suatu prosedur umum perkreditan mengenai ketentuan, syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan kredit oleh nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh bank.

Judul penelitian ini adalah : Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Daeng Sirua Makassar).

Adapun masalah yang diteliti oleh penulis adalah Apakah Pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Daeng Sirua telah efektif.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan cara tanya jawab. Kesimpulan didapat dari hasil penelitian, yang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank BRI Daeng Sirua Makassar dalam menunjang prosedur pemberian kredit cukup efektif.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Pemberian Kredit.

ABSTRAK

KISRAWATI AJUDALASTRI 2018. Effectiveness of internal lending control (case study at PT. Bank BRI (Persero) Tbk Unit Daeng Sirua Makassar). Drs. H. Ansyarif Khalid, (Counselor I), Sitti Zulaeha (Supervisor II).

Keyword : Internal Control, Credit Granting.

Internal control is, a system of procedures that can automatically check each other recording between parts or functions within an organization and prioritize accuracy and administrative. Usually this is done by employing two or more people independently, to obtain the same number or the same result.

Granting of credit, is a general procedure of credit regarding the terms, conditions or guidance of actions to be performed since the submission of credit application by the customer until the paying off a credit by the bank.

The title of this research is: Effectiveness of internal control of lending (case study at PT Bank BRI Daeng Sirua Makassar).

As for the problem studied by the author is whether the internal control of credit extended by Bank BRI (Persero) Tbk Unit Daeng Sirua has been effective.

This research uses descriptive qualitative with case study approach, with question and answer. The conclusion is obtained from the result of study, the effectiveness of internal control of the grant held by PT. Bank BRI Daeng Sirua Makassar in supporting the procedure of credit provision is quite effective.

Keywords: internal control, credit granting

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul skripsinya adalah “Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank BRI Daend sirua Makassar”.

Diawali dengan do'a dan sebuah perjuangan, memulai studi hingga penyusunan tugas akhir dengan melewati berbagai kendala, semuanya memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis. Pengalaman yang menjadi tenaga pendorong bagi penulis untuk meraih cita-cita. Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semuanya itu mengingat penulis juga masih dalam tahap belajar, tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan dan ketidak sempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis berikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulung, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.si Ak Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Ansyarif Khalid SE.,M.Si.,Ak.CA selaku dosen pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Sitti Zulaeha S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkhusus untuk Jurusan Akuntanai Ak 1-13 yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada bapak dan ibu saya yang telah membiayai saya sampai sekarang ini. Terima kasih untuk motivasi dan didikannya.

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Grand Teori	6
B. Kredit	6
C. Kebijakan Perbankan	20
D. Prosedur Pemberian Kredit	22
E. Administrasi Kredit	28
F. Efektivitas	36
G. Pengendalian internal pemberian kredit bank	37
H. Jurnal	39
I. Kerangka pikir	47
BAB III : METODE PENELITIAN	50
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
B. Teknik Pengumpulan Data	50
C. Definisi Opeasional	51
D. Teknik Analisis Data	51
BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	52

A. Nama dan sejarah perusahaan	52
B. Visi dan Misi	52
C. Struktur Organisasi	53
D. Aktivitas umum perusahaan	57
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Prosedur Pemberian Kredit pada Bank BRI Unit Daeng Sirua	59
B. Pemberian Putusa Kredit.....	60
C. ProsedurPermohonanKreditPada BRI DaengSirua...	61
D. Administrasi Realisasi/Pencairan dan Kontrol kredit.....	64
E. Prinsip Kehati Hatian Dalam Menyalurkan Kredit Pada Bank Bri Daeng SiruaAktivitas pengendalian	67
F. Manfaat Analisis Kredit.....	68
BAB VI : PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTARLAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

1. Junal Terdahulu.....	39
-------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir.....47
2. Struktur Organisasi.....54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang perkreditan yang merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam system operasional perbankan mengingat kredit merupakan sumber pendapatan utama bagi bank. Sebagai instrumen yang sangat menentukan maju mundurnya suatu bank, maka sektor yang dianggap vital ini selalu menjadi pusat konsentrasi para manajemen perbankan didalam menetapkan segala langkah-langkah strategi guna memelihara volume pertumbuhan, tingkat kelancaran serta tercapainya tingkat produktivitas yang optimal dari pinjaman dengan tetap memperhatikan tingkat resiko yang ada.

Peranan kredit dalam operasi bank sangat besar/penting, karena sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatannya dari operasi perkreditan. Maka untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan yang baik dan pengendalian internal yang efektif dan efisien.

Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yang paling besar dalam memberikan kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran kredit mengingat:

1. Bahwa bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik.
2. Bahwa pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca bank.

3. Bahwa risiko yang dikandung dalam penyaluran kredit cukup besar.

Sehingga perkreditan menjadi salah satu usaha yang penting bagi dunia perbankan serta dari perkreditan akan memberikan sumbangan pendapatan yang cukup besar pula, namun dibalik itu ternyata pengelolaan perkreditan mempunyai berbagai masalah yang cukup rumit seperti timbulnya kredit macet.

Kemudian dengan permasalahan yang ada dalam pemahaman ;

1. Masalah perkreditan bersifat kasuastis artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur lainnya.
2. Untuk dapat melaksanakan kredit dengan baik diperlukan juga sejumlah dana yang besarnya seimbang dengan biaya yang relative lebih rendah dari rata-rata suku bunga kredit.
3. Dalam perkreditan banyak tersangkut dengan ketentuan dan perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, maupun kebijakan pemerintah yang sering berubah dari satu periode ke periode yang lainnya.
4. Bentuk dari jasa perkreditan yaitu melepaskan sejumlah uang kepada debitur dan diganti dengan serangkaian ikatan perjanjian kredit, dalam hal ini pihak bank akan selalu dihadapkan pada resiko yang cukup besar apakah dari dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan akan dapat diterima kembali sesuai yang telah diperjanjikan.
5. Setiap kegiatan usaha akan selalu dipengaruhi dan diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berkembang secara cepat dari kurun waktu yang satu ke kurun waktu

berikutnya, oleh karena itu aparat perbankan pun selalu dituntut untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi secara terus-menerus.

6. Sebagaimana dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya maka perbankan juga dihadapkan pada persaingan-persaingan yang cukup ketat dalam memasarkan kreditnya. Oleh karena itu agar dapat bersaing, masing-masing bank harus dapat bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi serta harus mampu menciptakan produk-produk jasa-jasa yang baru ke masyarakat.

Selanjutnya disamping adanya berbagai kesulitan/masalah-masalah seperti tersebut di atas, yang harus dapat diselesaikan dengan baik, masih ada pula faktor-faktor yang harus dipertimbangkan serta diperhatikan secara seksama oleh para pengelola perkreditan agar kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya dapat diselesaikan dengan baik, baik pokoknya maupun bunga kredit itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pemberian kredit dapat berasal dari faktor intern dan ekstern seperti :

1. Faktor Intern Bank
 - a. Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit.
 - b. Kurang baiknya *management information system* yang dibangun pada bank yang bersangkutan.
 - c. Kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya.

2. Faktor Ekstern Bank

- a. Kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik/kebijaksanaan pemerintah yang diluar jangkauan bank untuk diperkirakan.
- b. Adanya bencana alam dan kejadian-kejadian lain yang diluar dugaan.
- c. Adanya persaingan yang cukup tajam diantara perbankan itu sendiri, sehingga Bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi risiko usahanya dibidang perkreditan.

Menitik beratkan pada uraian diatas maka penulis memilih “Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit”. (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Daeng Sirua Makassar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Daeng Sirua Makassar

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit studi kasus pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Daeng Sirua Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk lebih memahami teori dan aplikasi dalam aktivitas/praktik sesungguhnya.

- b. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sistem pemberian kredit dan membandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Bagi Bank

Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam masalah perkreditan khususnya dalam pengendalian internalnya.

3. Bagi Pembaca

- a. Sebagai bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai objek yang diteliti.
- b. Sebagai sumber informasi dan panduan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada objek/masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Grand Teori

Secara umum ada dua grand teori yang sering digunakan dalam penelitian didunia penelitian keuangan yaitu:

1. Agency theory yang dikembangkan oleh Jensen, M.C, and W.H Meckling (2011) teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Pemisahan pemilik dan manajemen didalam literatur akuntansi disebut dengan (teori agenan). Teori ini merupakan teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/menejer
2. Menurut Brigham (2011) signaling teori adalah suatu tindakan yang diambil manajemen suatu perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusaah dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain termasuk menggunakan hutang. Signaling teori mengemukakan tentang

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Kedua grand theory ini dapat digunakan dalam penelitian keuangan atau penelitian manajemen akuntansi.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan yang timbul antara dua pihak dan menimbulkan pertukaran suatu nilai sekarang dengan nilai dikemudian hari antara kedua belah pihak. Berdasarkan UU No. 10 1988 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992, pengertian kredit adalah sebagai berikut :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Adapun menurut Hasibuan (2006:87), pengertian kredit adalah

“semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Menurut definisi di atas, ada dua pihak yang berkepentingan terhadap pemberian kredit yaitu pihak pertama disebut kreditur dalam hal ini bank, dan pihak kedua yang disebut debitur (nasabah) yang

mendapat kepercayaan untuk menerima kredit dengan beban bunga tertentu.

2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Suyatno dkk (2003: 14), unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau, jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontaprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Tingkat resiko (degree of risk), yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

3. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri.

Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut Kasmir (2006:105) tujuan pemberian kredit yaitu :

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

4. Fungsi Kredit

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas.

Menurut Kasmir (2006 : 106) fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Untuk meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran.

- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal ini pinjaman internasionalkan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

5. Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Menurut Kasmir (2006 : 109) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau namabaik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

4) Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang.

5) Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6) Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.

7) Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

8) Dan sektor-sektor lainnya.

6. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk penilaian dengan analisis 5C menurut Kasmir (2006 : 117) adalah sebagai berikut :

a. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan *Capability*.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk

membayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Selanjutnya penilaian suatu kredit dengan analisis 7P menurut Kasmir (2006 : 119) adalah sebagai berikut :

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta

karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya

7) Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Serta penilaian kredit dengan prinsip 3R yaitu:

a) Return

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur dengan kredit, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya dan perusahaan bisa berkembang terus atau tidak.

b) Repayment

Bank harus menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pinjamannya pada saat-saat kredit harus dicicil atau dilunasi.

c) Risk bearing ability

Bank harus menilai sampai sejauh mana perusahaan mampu menanggung risiko kegagalan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

C. Kebijakan Per Kreditan

Kebijakan per kreditan bank harus diprogramkan dengan baik dan benar. Program per kreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian.

Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia.

Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.

Kehati-hatian artinya besar plafond kredit harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C dan 7P dari setiap calon peminjam.

Kebijaksanaan (*policy*) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan (GR Terry).

Menurut Hasibuan (2006:92), Kebijakan Perkreditan antara lain:

- a. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - 1) *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - 2) *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder.
 - 1) Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin, dan ATK. Dana investasi primer harus dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang. Investasi primer ini

tidak mutlak harus dilakukan karena merupakan motor kegiatan operasional bank.

2) Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi ini sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.

c. Kebijakan Risiko

Kebijakan risiko maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.

d. Kebijakan penyebaran kredit

Kebijakan kredit maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.

e. Kebijakan tingkat bunga

Kebijakan tingkat bunga maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

D. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur umum perkreditan merupakan ketentuan, syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan kredit oleh nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang

diberikan oleh bank. Menurut Thomas Suyatno, dkk (2003:69-87) prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank yaitu tahap permohonan kredit, penyelidikan dan analisis kredit, keputusan penolakan atau persetujuan permohonan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit.

1. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis kredit, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan/pembaruan masa lalu kredit yang telah berakhir jangka waktunya, permohonan-permohonan lain untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan dan perubahan atau pengunduran jadwal angsuran.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah, daftar

Isian yang disediakan oleh bank yang sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah serta daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan. Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.

2. Penyidikan dan Analisis Kredit

Penyidikan (investigasi) kredit adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum permohonan kredit dikabulkan atau ditolak, didalam penyidikan kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan wawancara dengan debitur, setelah itu mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern ataupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar kredit macet. Kemudian melakukan penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang mempersiapkan pekerjaan penilaian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Pada tahap ini juga disusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penilaian dan kesimpulan serta penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh kredit analis. Pembagian kerja tersebut dilakukan apabila kondisi organisasi perkreditan memungkinkan, namun apabila bank tidak memiliki pegawai yang khusus melakukan pekerjaan itu maka analisis dan penyidikan dilakukan oleh pejabat tinggi pada bank yang

bersangkutan, karena pimpinan bank dianggap hebat untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Bank perlu mengadakan penelitian mengenai kewajaran dan kebenaran atas data dan informasi yang diperoleh dari nasabah sebelum bank melakukan analisis-analisis selanjutnya yang tingkatannya lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penarikan kesimpulan yang kurang tepat serta untuk menghindari keterlambatan pengambilan keputusan. Petugas kredit juga melakukan analisis modal kerja yang dibutuhkan, hal ini harus dilakukan agar jumlah kredit yang akan diberikan kelak tidak akan *underfinancing* atau *overfinancing*.

3. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Keputusan adalah setiap pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum pada laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan harus dibutuhkan secara tertulis.

Kepala bagian kredit atau kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan suatu permohonan kredit dalam batas-batas tertentu seperti yang telah tercantum dalam kebijakan bank, jika permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah diluar wewenang kantor cabang,

maka cabang harus mengusulkannya terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada direksi atau kantor pusat disertai hasil penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian setelah permohonan kredit itu dipelajari maka direksi atau kantor pusat akan memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit yang dilakukan oleh cabang.

Pada saat kantor cabang mengusulkan permohonan kredit yang diusulkan nasabah kepada kantor pusat, maka didalam surat permohonan yaitu kantor cabang memberikan data-data yang memuat informasi mengenai perilaku nasabah, kemampuan dan pengalaman berusaha dan hal-hal yang mencerminkan kepribadian serta kemampuan calon nasabah di dalam pelunasan kredit. Kemudian data selanjutnya adalah data mengenai aktifitas usaha yang dilakukan oleh calon nasabah, jaminan yang akan disertakan, serta laporan keuangan perusahaan calon nasabah.

4. Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya. Dalam hal penolakan permohonan baru, jika diminta, semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon maka kecuali surat permohonannya.

5. Persetujuan Permohonan Kredit

Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain seperti surat penegasan persetujuan kredit kepada pemohon yang disampaikan secara tertulis.

Dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan perbedaan jenis-jaminan seperti jaminan pokok dan jaminan tambahan. Selanjutnya yaitu penandatanganan perjanjian kredit. Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian kredit di atas meterai yang cukup dan mengembalikannya kepada bank dan nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit.

6. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang disetujui oleh pihak bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dana atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah terpenuhi. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan perjanjian kredit mutlak harus mendahului sebelum pencairan kredit.

Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang telah ditentukan oleh pihak bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kwitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. Alat-alat pencairan tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan arsipnya

7. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan fasilitas kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelunasan kredit adalah memperhitungkan semua kewajiban nasabah yang harus segera diselesaikannya sampai dengan tanggal pelunasan, yaitu seperti utang pokok, utang bunga, denda-denda jika ada dan biaya administrasi lainnya.

E. Administrasi Kredit

1. Pengertian Administrasi Kredit

Sebagai alat penunjang dalam mengusahakan kredit sehat, penyelenggaraan administrasi kredit dengan tertib, lengkap, efisien, dan *upto date* merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai pengorganisasian dan pengadministrasian sumber daya manusia, modal, mesin-mesin, teknologi, dan segala fungsi dalam memberikan nilai ekonomi kepada seseorang dengan landasan

kepercayaan saat ini bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada bank dalam waktu tertentu.

Jadi administrasi kredit yang dilaksanakan dengan baik diharapkan merupakan instrument pengawasan kredit serta dapat memperjelas pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang diterapkan pada bidang perkreditan.

Feedback dari proses administrasi kredit adalah output berupa system informasi yang memberikan manfaat dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen bank.

Menurut Rivai dan Veithzal (2006:758) pengertian administrasi kredit,yaitu:

“Susunan kegiatan dalam proses kegiatan, dalam usaha mengumpulkan dan menyajikan informasi, penguasaan dokumen, pencatatan secara sistematis oleh unit kerja terkait, selain sebagai alat pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di bidang perkreditan”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi kredit merupakan hal yang penting dalam setiap aspek kegiatan bank karena dapat meminimalkan salah pengertian dan sekaligus yang memisahkan administrasi kredit dari aspek marketing, aspek produksi/operasional, dan aspek finansial bank.

2. Unsur-unsur Penting dalam Administrasi Kredit

Dalam proses pelaksanaan administrasi kredit ditujukan untuk menata proses kegiatan perkreditan agar mampu berfungsi sebagai

feedback bagi manajemen bank untuk mencapai *loan* Portofolio yang sehat. Dengan demikian, terdapat beberapa unsur penting dalam pelaksanaannya yang menjadi pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

a. Tersedianya Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan administrasi kredit ini diperlukan tenaga-tenaga yang terlibat secara langsung, seperti *computer operator*, *loanofficer*, *account officer*, dan manajer. Pejabat-pejabat tersebut dituntut mempunyai pengetahuan dan ketrampilan perkreditan. Dengan adanya sumber daya manusia yang mempunyai konsep-konsep manajemen, khususnya di bidang perkreditan, mereka diharapkan dapat mengumpulkan, mengolah, menyajikan informasi dengan lengkap, akurat, dan *up to date*. Informasi perkreditan itu penting bagi manajemen untuk menyusun strategi perkreditan, agar tercapai objektif kredit bank, yaitu minimalisasi risiko dan maksimalisasi pendapatan. Disamping itu, informasi-informasi diperlukan oleh faktor ekstern, seperti pihak otoritas moneter *Join tfinancing member* dan sebagainya.

b. Sistem dan Prosedur Perkreditan

Susunan administrasi kredit yang lengkap dan sistematis memudahkan manajemen membuat *action program*. Hal ini hanya dapat dilaksanakan bila ada operating procedure berupa manual atau standard operating procedure. Aturan main yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengendalian,

pengorganisasian, aktualisasi, dan administrasi) adalah sistem dan prosedur perkreditan.

Sistem dan prosedur harus dibuat secara tertulis sebagai pedoman tata kerja yang harus diikuti oleh semua pejabat yang terlibat dalam kegiatan administrasi kredit. Di samping itu, harus dibuat standar yang bersifat fleksibel untuk pedoman tingkat suku bunga, provisi, *commitment fee*, dan lain-lain, untuk masing-masing jenis kredit. Kemudian, dari hal-hal tersebut diatas struktur organisasi, *jobdescription*, standar kolektibilitas kredit, *form standar*, *test key*, dan lain-lain yang harus diperhatikan juga. Tentu sistem dan prosedur itu, antara suku bank dengan bank lainnya tidak akan sama karena jenis/struktur organisasi bank masing-masing sangat mempengaruhinya, seperti besar-kecilnya bank, status bank devisa atau nondevisa, serta *unit banking system* atau *branch banking system*

c. Peralatan (*hardware*)

Tersedianya sumber daya manusia dan sistem/prosedur dalam kegiatan administrasi kredit belum mampu menjamin bahwa akan terkumpul dan tersajinya informasi mengenai perkreditan yang lengkap, akurat dan *up to date*. Untuk itu, dibutuhkan peralatan yang mendukung kelancaran jalannya administrasi kredit, seperti sumber informasi *credit file*, *standard form*, *computer plus software*, *telex*, atau telepon, foto kopi, *filing cabinet*, ruang penyimpanan dan lain-lain.

3. Fungsi Administrasi Kredit

Administrasi merupakan salah satu fungsi manajemen dalam system manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, administrasi kredit dapat memberikan umpan balik (*feedback*) kepada manajemen, juga sebagai sarana untuk menata sistem administrasi, sistem laporan, sistem evaluasi kolektibilitas kredit/pasar/jenis kredit sehingga mampu menunjang portofolio kredit sehat dan memperkuat posisi bank, baik dalam aspek yuridis maupun dalam aspek ekonomisnya pada masa mendatang. Bila disimpulkan dari pengertian di atas, maka administrasi kredit berfungsi sebagai berikut:

a. Sebagai sumber informasi

Sebagai sumber informasi, *feedback* yang dihasilkannya akan mampu menggerakkan fungsi-fungsi manajemen kredit lainnya seperti halnya perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, kontrol, serta evaluasi sehingga dapat memadukan langkah-langkah setiap unit kerja terkait dalam meluruskan penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi. Kemudian memberikan landasan yang kuat dalam menyusun suatu strategi baru untuk meningkatkan efisiensi kredit.

b. Alat Komunikasi Bank dengan Nasabah

Dalam proses pembinaan nasabah, seperti langkah pembinaan, penyehatan, penagihan, dan penyelamatan kredit, kontak-kontak tidak langsung antara bank dengan nasabah merupakan langkah vital karena kontak-kontak tersebut dapat saling memberikan informasi tentang kondisi ekonomi dan kondisi perusahaan serta bank dapat

mengikuti perkembangan kegiatan usaha nasabah sehingga meminimalkan biaya (kerugian).

Kontak tidak langsung seperti tersebut di atas, menunjukkan kemampuan mengelola ribuan nasabah sehingga bank dapat mengantisipasi kemungkinan risiko (kerugian) dan terpeliharanya mutu kredit (kolektibilitas). Administrasi kredit dapat menjembatani bank dengan nasabah sehingga pembinaan, penyehatan, penagihan, penyelamatan kredit dapat dilakukan sedini mungkin (*early warning system*). Bila administrasi dapat berfungsi secara baik, bank dengan para nasabahnya secara bersama-sama mampu memperbaiki kondisi atau kemungkinan deviasi yang terjadi, serta dapat menyusun strategi selanjutnya.

c. Sebagai Instrumen Pengawasan Kredit

Langkah untuk mengetahui sedini mungkin penyimpangan (deviasi), terutama yang berupa indikasi-indikasi (*sign*) itu bisa diperoleh secara administrasi (*on desk monitoring*) dengan menggunakan instrument administrasi kredit.

d. Sumber Materi Pembuat Laporan

Laporan perkreditan sangat dibutuhkan oleh unit-unit kerja intern organisasi bank dan otoritas moneter serta pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kredit tersebut. Laporan tersebut dibuat baik secara periodik maupun secara insidental, merupakan tolak ukur pelaksanaan administrasi kredit yang baik.

e. Alat untuk Penentuan Kualitas Kredit

Proses kegiatan kredit itu merupakan suatu proses yang dinamis, selalu peka (*sensitive*) dengan perubahan-perubahan sepanjang waktu, juga peka terhadap siklus usaha (*business cycle*) yang terjadi setiap waktu. Bila diperhatikan dari posisi dan kondisi kredit/kondisi usaha nasabah dari hari ke hari, juga akan mengalami perubahan-perubahan dan adanya perubahan tersebut harus diikuti secara teratur, tercatat, terdokumentasi dengan baik.

f. Alat Bukti dan Antisipasi Bila Ada Sengketa

Fungsi ini bermanfaat dalam mengantisipasi keadaan yang tidak menguntungkan bagi bank misalnya bila terjadi wanprestasi dan ketidak harmonisan hubungan bank dengan nasabah. Hubungan dapat rusak bila terjadi perselisihan antara:

- 1) Bank dengan nasabah
- 2) Nasabah dengan pihak lain
- 3) Bank dengan bank lain
- 4) Nasabah dengan nasabah bank lain.

Jika administrasi kredit diselenggarakan dengan lengkap, tertib, dan akurat, yaitu adanya akad kredit, perjanjian secara autentik, pengikatan secara yuridis, penutupan asuransi, pelimpahan kekuasaan secara yuridis (hipotek dan kuasa menjual), maka akan membantu bank dalam penyelesaian perselisihan. Bank yang dapat melaksanakan penyelenggaraan administrasi kredit secara lengkap,

tertib, *up to date*, akan berada dalam posisi yang kuat secara hukum maupun ekonomi.

4. Ruang Lingkup Administrasi Kredit

Administrasi kredit diperlukan sebagai alat penunjang dan alat monitoring kegiatan perkreditan agar terwujud kredit yang sehat dengan minimalnya risiko dan optimalnya profit. Kegiatan perkreditan yang termasuk ruang lingkup administrasi kredit adalah kegiatan-kegiatan berikut ini:

a. Proses kegiatan perkreditan (perencanaan kredit)

Untuk melengkapi manajemen dengan suatu program yang terencana mengenai perencanaan kredit dan pengelolaan kredit yang dilandasi suatu hasil investigasi, studi dan penelitian perencanaan kredit sangat diperlukan dalam proses pengawasan penggunaan dan efisiensi pengalokasian dana sehingga *spread management*, *gap management*, dan *interest sensitivity* dapat dikendalikan.

b. Analisis kredit

Analisis kredit bertujuan untuk menentukan/mengantisipasi adanya kemauan (*willingness*) dan kemampuan (*ability*) nasabah mengembalikan kredit sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati antara bank dengan nasabah. Untuk mengetahui kemauan dan kemampuan itu, permodalan jaminan dan perspektif usaha nasabah.

c. *Credit document*

Semua kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas kredit ini harus dibuat dokumennya agar posisi bank lebih kuat dan mampu mengantisipasi keadaan mendatang. Kegiatan ini disebut pelaksanaan dokumentasi kredit. Semua warkat dan dokumen yang merupakan bukti-bukti kepemilikan dan penguasaan barang-barang baik barang modal, maupun bahan baku, berbagai barang jaminan baik berbentuk riil, maupun berbentuk *goodwill*.

d. *Credit disbursement*

persiapkan dokumen secara lengkap, fasilitas kredit yang telah disetujui dapat digunakan oleh nasabah sesuai dengan jadwal penggunaannya. Ada tiga syarat mutlak, agar fasilitas kredit itu riil mampu meningkatkan taraf hidup (meningkatkan performa) nasabah, yaitu aman, terarah, dan produktif.

e. Pengelolaan kredit

Portofolio kredit dapat dibagi dalam kelompok-kelompok, namun secara umum terdiri dari *individual loan portofolio*, *branch loanportofolio*, dan *loan portofolio*. Kegiatan administrasi dibidang ini meliputi pengelolaan secara administratif, proses pengawasan, kredit bermasalah, dan pengorganisasi kredit.

F. Efektivitas

Menurut Komarudin (1994:249) pengertian efektivitas adalah:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu”.

Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan atau diinginkan organisasi. Efektivitas diperlukan karena merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi, sebab sebelum kita dapat melakukan kegiatan dengan efisien, kita harus yakin telah menemukan hal yang tepat untuk dilakukan.

Pihak bank memberikan kredit dengan maksud dan tujuan tertentu yang dikehendakinya. Agar pemberian kredit ini sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu yang dikehendaki maka perlu melakukan pengendalian internal pemberian kredit oleh pihak bank, dengan memperhatikan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pemberian kredit dan aspek-aspek dalam pengawasan pemberian kredit. Jadi pengendalian internal pemberian kredit dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau maksud serta tujuan yang dikehendaki oleh pihak bank, yaitu kredit diberikan sesuai dengan system dan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan. Apabila system pemberian kredit belum dilaksanakan secara memadai, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal pemberian kredit.

G. Pengendalian Internal Pemberian Kredit Bank

1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Kredit Bank

Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet.

Menurut Hasibuan (2006:105) pengendalian kredit adalah

“usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet”.

Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar.

Tujuan pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:

- 1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman;
- 2) Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- 3) Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- 4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- 5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- 6) Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
- 7) Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

2. Sistem dan Jenis-jenis Pengendalian Kredit

1. Sistem pengendalian kredit

- a) *Internal Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
- b) *Audit Control of Credit* adalah sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank.
- c) *External Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

2. Jenis-jenis Pengendalian Kredit

- a) *Preventive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. PCC dilakukan dengan cara penetapan plafond kredit pemantauan debitur, dan pembinaan debitur.
- b) *Repressive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet. RCC dilakukan dengan cara *reschendulling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit untuk membayar pinjaman debitur.

H. Jurnal

Welly (2015) dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit Pada

Perbankan Syariah Di Kota Palembang”, metode penelitian yang dipakai yakni metode asosiatif. Hasil penelitiannya yakni Struktur pengendalian intern X1 yang diterapkan di perbankan Syariah di Kota Palembang tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran kredit. Sedangkan X2 berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran kredit yang diterapkan di perbankan Syariah di Kota Palembang. Pengaruhnya sebesar 20%.

Putri oceana maharani dan I wayan ramantha (2014) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Struktur Pengendalian Inrern Terhadap Kinerja Perkreditan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Dempasar”. Metode penelitian yang dipakain yakni metode regresi linear berganda. Hasil penelitiannya yakni Struktur pengendalian intrnal pada BPR di Kota Denpasar telah dilakukan dengan baik dan berada pada kreteria efektif.

Retno martanti E.L dan Masruroh (2015) metode penelitiannya yang berjudul “Peran Sistem Pengendalian Internl Pemberian Kredit Dalam Meminimalisasi Non Performing Loan Pada PT. Bank Mitra Niaga Tbk” metode yang dipakai yakni metode kualitatif dan kuantitatif statistik. Hasil penelitiannya yakni sistem pengendalian internal pemberian kredit sangat berperan dalam meminimalisasi non ferforming lain pada PT Bank Mitraniaga Tbk, hal ini berdasarkan hasil penelitian dari perhitungan tingkat korelasi sebesar 84,4%.

Zulkifli Lubis (2016) judul penelitiannya berjudul “Peranana Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internl Pemberian Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Medan”. Metode penelitiannya yang dipakai yakni metode Statistik deskriptif. Hasil penelitiannya yakni Laporan

internl auditor disampaikan kepada dewan komisaris secara lisan maupun tulisan berisi ringkasan temuan, peninjauan kembali, analisa, tindakan koreksi unit yang bertanggung jawab.

Lukieto Cahyadi, SE, MM. STIE Bina Karya Tebing Tinggi (2014). Penelitiannya berjudul "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi". Metode yang dipakai yakni melakukan tinjauan atas prosedur pemberian kredit pada PT BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi. Hasil penelitiannya yakni masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai yaitu adanya beberapa hal yang kurang sesuai yaitu adanya beberapa pada staf bagian tertentu yang belum terisi yang disebabkan karena kurangnya karyawan sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang.

Made Oka Hari Setiawan dan Gede Saparta Wisadha (2014) judul penelitiannya yakni "Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Bandung". Metode yang dipakai yakni metode kualitatif. Hasil penelitiannya yakni Efektivitas struktur pengendalian intern atas prosedur kredit dalam upaya menekan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan sangat efektif.

Mohammad Muzamil (2015) judul penelitiannya yakni "Analisis Penerapan System Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Samarinda". Metode yang dipakain yakni metode kualitatif. Hasil penelitiannya yakni praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan

fungsi setiap unit organisasi yang diterapkan di BRI KCP unit karang paci samarinda masih kurang sesuai dengan unsur-unsur SPI.

Maman Suherman (2008) judul penelitiannya yakni “Peranan Sistem Informasi Kredit Dalam Menunjang Pemberian Kredit Usaha Di PT.BRI (Persero) Cabang Banjar Unit Banjar”. Metode yang dipakai yakni metode deskriptif analisis. Hasil penelitiannya yakni PT. (Persero) BRI Cabang Banjar unit banjar telah melakukan system informasi kredit dengan menerapkan unsur-unsur dalam menunjang pemberian kredit usaha secara baik.

Budi prijanto dan Dessy puspitasari (2005) judul penelitiannya yakni “Evaluasi Efektivitas Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Studi Kasus Pada PT Bank Eksekutif Internasional (Persero) Tbk Cabang Kelapa Gading”. Metode yang digunakan yakni metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya yakni Pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit investasi pada Bank eksekutif internasional (Persero) Tbk cabang kelapa gading, jakarta timur dinilai baik.

Jeaneth rut uhise (2013) judul penelitiannya yakni “Analisis penerapan sistem pengendalian manajemen penyaluran kredit pada BRI Kota Manado”. Metode yang digunakan yakni metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya yakni PT Cabang Manado telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian, seperti nilai integritas yang ditunjukkan melalui kepatuhan pada standar operasional prosedur yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

N O	Welly, 2015	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.		Pengaruh struktur pengendalian intern dan system pengendalian intern terhadap efektivitas penyaluran kredit pada perbankan syariah di kota Palembang.	Asosiatif	Struktur pengendalian intern X1 yang diterapkan di perbankan Syariah di Kota Palembang tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran kredit. Sedangkan X2 berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran kredit yang diterapkan di perbankan Syariah di Kota Palembang. Pengaruhnya sebesar 20%.
2.	Putri Oceana Maharani, I Wayan Ramatha2014	Pengaruh efektivitas struktur pengendalian inern terhadap kinerja perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Dempasar.	Regresi linear berganda	Struktur pengendalian intrn pada BPR di Kota Denpasar telah dilakukan dengan baik dan berada pada kreteria efektif.
3.	Retno martanti E.L dan Masruroh, 2015	Peran sistem pengendalian internl pemberian kredit	Kualitatif dan kuantitatif	Sistem pengendalian internal

		dalam meminimalisasi non performing loan pada PT. Bank Mitra niaga	statistik	pemberian kredit sangat berperan dalam meminimalisasi non performing loan pada PT Bank Mitraniaga Tbk, hal ini berdasarkan hasil penelitian dari perhitungan tingkat korelasi sebesar 84,4%.
4.	Zulkifli Lubis, 2016	Peranana Audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Medan.	Statistik deskriptif	Laporan internal auditor disampaikan kepada dewan komisaris secara lisan maupun tulisan berisi ringkasan temuan, peninjauan kembali, analisa, tindakan koreksi unit yang bertanggung jawab.
5.	Lukieto Cahyadi, SE, MM. STIE Bina Karya Tebing Tinggi. 2014	Analisis prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 cabang tebing tinggi.	Melakukan tinjauan atas prosedur pemberian kredit pada PT BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi.	Masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai yaitu adanya beberapa hal yang kurang sesuai yaitu adanya beberapa pada staf bagian tertentu yang belum terisi yang disebabkan karena kurangnya karyawan sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang.

6.	Made Oka Hari Setiawan dan Gede Saparta Wisadha, 2014	Analisis efektivitas struktur pengendalian intern atas prosedur kredit pada bank perkreditan rakyat di Kabupaten Bandung.	Kualitatif	Efektivitas struktur pengendalian intern atas prosedur kredit dalam upaya menekan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan sangat efektif.
7.	Mohammad Muzamil, 2015	Analisis penerapan system pengendalian internl penyaluran kredit pada BRI kota samarinda	Kualitatif	Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi yang diterapkan di BRI KCP unit karang paci samarinda masih kurang sesuai dengan unsur-unsur SPI.
8.	Maman Suherman, 2008	Peranan sisitem informasi kredit dalam menunjang pemberian kredit usaha di PT.BRI (Persero) cabang banjar unit banjar	Deskriptif analisis	PT. (Persero) BRI Cabang Banjar unit banjar telah melakukan system informasi kredit dengan menerapkan unsusr-unsur dalam menunjang pemberian kredit usaha secara baik.
9.	Budi prijanto dan Dessy puspitasari	Evaluasi efektivitas struktur pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit investasi, studi kasus pada PT Bank eksekutif internasional (Persero) Tbk cabang	Analisis deskriptif	Pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit investasi pada Bnak ksekutif internasional (Persero) Tbk

10.	Jeaneth rutuhise (2013).	kelapa gading "Analisis penerapan sistem pengendalian manajemen penyaluran kredit pada BRI Kota Manado".	Analisis deskriptif.	cabang kelapa gading, jakarta timur dinilai baik. PT Cabang Manado telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian, seperti nilai integritas yang ditunjukkan melalui kepatuhan pada standar operasional prosedur yang berlaku
-----	--------------------------	---	----------------------	--

Jurnal

Nabila habibie (2013) dengan penelitian yang berjudul "Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado". Metode yang digunakan yakni metode deskriptif. Hasil penelitiannya yakni untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern piutang usaha yang kurang efektif, yang hal ini ditandai dengan tidak adanya asuransi bagi fungsi yang melaksanakan penagihan dengan aktivitas pengendalian intern terhadap piutang usaha pada PT. Adira finance kurang efektif.

Riska S.Papalangi (2013) judul penelitiannya yakni "Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM Pada PT. BRI (Persero) TBK Manado. Metode yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yakni sistem pengendalian internal yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur pengendalian internal.

Made Oka Hari Setiawan dan Gede Saparta Wisadha (2014) judul penelitiannya yakni “Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Bandung”. Metode yang dipakai yakni metode kualitatif. Hasil penelitiannya yakni Efektivitas struktur pengendalian intern atas prosedur kredit dalam upaya menekan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan sangat efektif.

Jurnal.

N O	Nama Peneliti dan Tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Nabila habibie (2013)	Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado	Metode deskriptif	untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern piutang usaha yang kurang efektif, yang hal ini ditandai dengan tidak adanya asuransi bagi fungsi yang melaksanakan penagihan dengan aktivitas pengendalian intern terhadap piutang usaha pada PT. Adira finance kurang efektif.
2.	Riska S.Papalangi (2013)	Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM Pada PT. BRI (Persero) TBK Manado.	Metode deskriptif	Hasil penelitiannya yakni sistem pengendalian internal yang

3.	Made Oka Hari Setiawan dan Gede Saparta Wisadha, 2014	Analisis efektivitas struktur pengendalian intern atas prosedur kredit pada bank perkreditan rakyat di Kabupaten Bandung.	Kualitatif	<p>diterapkan telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur pengendalian internal.</p> <p>Efektivitas struktur pengendalian intern atas prosedur kredit dalam upaya menekan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan sangat efektif.</p>
----	---	---	------------	---

I. Kerangka Pikir

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui kredit. Jika seseorang memperoleh kredit, berarti dia memperoleh kepercayaan diri yang memberikan kredit, bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukan merupakan suatu perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar saja, tetapi di desa-desa pun kata kredit sudah sangat populer.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan:

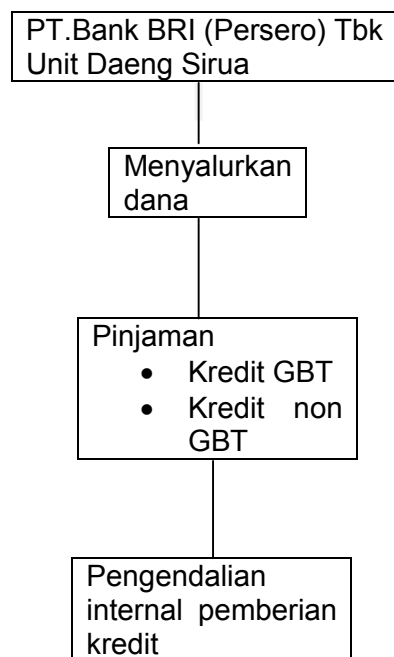
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipergunakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga perkreditan baru akan memberikan kredit apabila dia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu tertentu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit, antara lain kepercayaan, waktu, tingkat resiko, prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa.

Kredit memiliki manfaat yang cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak kepentingan, bagi debitur, kredit memberikan manfaat agar debitur dapat

mengembangkan usahanya dengan cara menggunakan dana kredit tersebut untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia, perluasan pasar, sumber daya alam dan teknologi.

Gambar Kerangka fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Unit Daeng Sirua Makassar yang terletak di jalan Daeng Sirua No. 15. Sedangkan Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari sampai selesai pada tahun 2018.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan studi kasus pada Bank BRI unit Daeng sirua, maka penulis menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data sebagai berikut :

Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a) Wawancara ,yaitu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab langsung dengan pejabat yang berwenang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil wawancara, penulis akan memperoleh data mengenai gambaran umum dan sejarah perkembangan perusahaan khususnya yang menyangkut kegiatan pemberian kredit.
- b) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas perusahaan yang erat kaitannya dengan masalah sistem pemberian kredit dana aktivitas

pengendalian internal pemberian kreditnya. Penulis akan melakukan observasi pada Bank BRI Unit Daeng sirua mengenai proses penerapan pengendalian internal pemberian kredit di bagian kredit dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan

C. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
2. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berari.
3. Proses internal adalah mengidentifikasi faktor kritis dalam dalam proses internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses.

D. Teknik Analisis Data

Melakukan penelitian, dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh cukup lengkap sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh untuk menarik kesimpulan secara umum mengenai perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Awal berdirinya Bank Indonesia (BRI) Di pelopori oleh seorang patih Banyumas, Jawa Tengah yang Bernama Raden Bei Aria Wiraatmadja sebagai putra pribumi yang kala itu memiliki kesadaran untuk melakukan kegiatan di bidang perbankan. Kegiatan tersebut dirintis mulai tahun 1884 dengan mendirikan De Powerwokertosche Hulp En Spaarbank Der Islandenshe Hoofden yang awalnya hanya menampung pembayaran angsuran para peminjam kas masjid. Pada tanggal 16 Desember 1895 dengan bantuan Asisten Residen Banyumas E.sieburg, pendirian Bank tersebut diresmikan sehingga tanggal tersebut dijadikan sebagai tanggal berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia.

B. Visi Dan Misi

Visi BRI

- Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

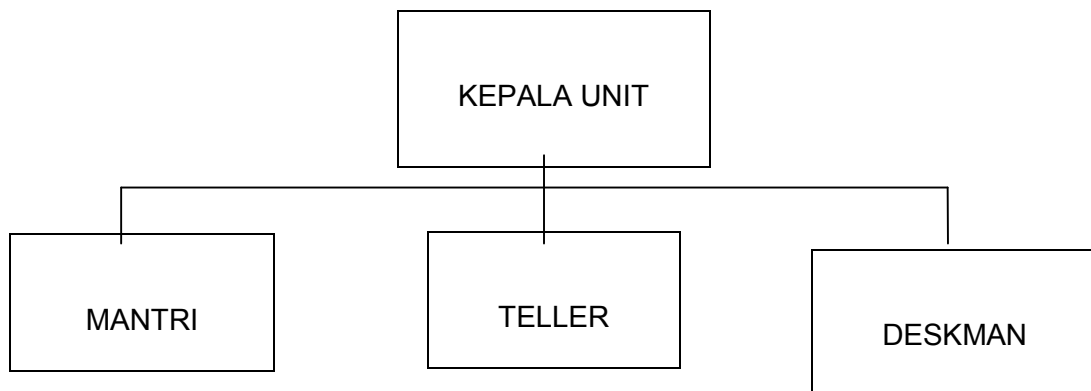
Misi BRI

- Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional

- Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bank BRI Unit Daeng Sirua



Sumber : Bank BRI Daeng Sirua

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab:

Kepala unit

Tugas pokok:

- a. Memimpin kantor BRI Unit sesuai dengan tugas pokok penerimaan simpanan, pemberian pinjaman, dan pelayanan jasa bank lain yang ditetapkan serta membina BRI Unit dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di wilayah sekitarnya.
- b. Menyusun rencana kerja Anggaran tahun BRI Unit.

- c. Menetapkan kebutuhan pegawai dan mengkoordinir atau selalu mengevaluasi pelaksanaan kerja sama yang baik dengan unit-unit atau sub organisasi BRI dan instansi lainnya sesuai dengan tugas pokok BRI unit serta batas-batas yang dimiliki.
- d. Memberikan bimbingan, membuat daftar penilaian karyawan dan prestasi kerja secara periodik, serta saran usulan kenaikan pangkat bawahannya.

Tanggung Jawab:

- a. Pencapaian sasaran atas rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan termasuk pencapaian target dididatn pengumpulan dana dari masyarakat atau kinerja usaha unit.
- b. Kelancaran tugas-tugas operasional termasuk efisiensi dan tercapainya kepuasan nasabah atau pelayanan yang diberikan oleh setiap petugas BRI.
- c. Tersedianya kas yang selalu mencukupi
- d. Terpeliharanya mekanisme watak di BRI unit.
- e. Ketertiban dan kedisiplinan kerja serta keterampilan pegawai BRI unit yang dipimpin.
- f. Memelihara citra BRI dimasyarakat.
- g. Kebenaran isi laporan dan ketetapan waktu penyampaian laporan.
- h. Terselenggaranya kerjasama yang baik dengan instansi lainnya.
- i. Keamanan ketertiban, dan kebersihan kantor BRI unit.

Mantri

Tugas Pokok:

- a. Memeriksa permintaan pinjaman ke tempat usaha nasabah yang meliputi usahanya, letak jaminan dan menganalisisnya, serta mengusulkan kepada kepala unit.
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan.
- c. Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa Bank kepada masyarakat untuk berhubungan dengan BRI unit.
- d. Melaksanakan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa ketempat usaha nasabah, menagih, dan mengusulkan langkah-langkah penanggulangannya.
- e. Menyampaikan hasil kunjungan ke tempat nasabah ke kepala unit.
- f. Menyampaikan laporan kepala unit apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan operasional BRI unit.
- g. Mengikuti kegiatan ekonomi diwilayah kerjanya dalam melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala unit sepanjang tidak melanggar atas pengawasan intern.

Tanggung Jawab:

- a. Kebenaran hasil pemeriksaan ketempat nasabah yang meliputi kegiatan usahanya, letak jaminan, serta keputusan pinjaman.
- b. Ketetapan pemasukan angsuran pinjaman dan pemasukan tunggakan tunggakan pinjaman lainnya di BRI unit.

c. penguasaan data perkembangan usaha masing-masing nasabah.

Teller

Tugas Pokok:

- a. Bersama-sama kepala unit menyelenggarakan pengurusan kas BRI unit.
- b. Menerima uang setoran dari nasabah dan memvalidasi ke dalam computer.
- c. Memberikan persetujuan bayar atas pengambilan simpanana sebatas kewenangan yang dimiliki.
- d. Menyetorkan setiap ada kelebihan kas setiap jam kerja dan penyetoran sisa kas setiap jam kerja dan penyetoran sisa kas pada akhir kas induk dengan menggunakan tanda setoran serta mengisi 16 perincian kas.
- e. Memastikan kelengkapan bukti-bukti kas tunai yang berada dalam pengawasannya untuk menghindari penyimpangan kas teller.

Tanggung Jawab:

- a. Pengurusan kas bersama kepala unit
- b. kelancaran dan ketetapan pelayanan dan penerimaan setoran dan pelayanan uang baik itu dari atau untuk nasabah.

Deskman

Tugas Pokok:

- a. Menata usaha register-register simpana dan pinjaman, register pemberantasan tunggakan, dan register surat-surat berharga.

- b. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah pinjaman, simpanan, dan jasa perbankan lainnya di BRI unit dengan sebaik-baiknya.
- c. Mengelola penyimpanan berkas-berkas pinjaman dan simpanan.
- d. Mengerjakan semua laporan BRI Unit.

Tanggung Jawab:

- a. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala unit.
- b. Penyelenggaraan kliring masuk maupun kliring keluar seta transfer masuk dan transfer keluar.

D. Aktivitas Umum Perusahaan

Kegiatan usaha yang diselenggarakan Bank Rakyat Indonesia unit Daeng Sirua Makassar terdiri dari:

1. Usaha Simpanan

- a. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya: Tabungan Simpedes dan Britama.
- b. Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesudah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Misalnya: Deposito BRI Rupiah.

2. Usaha Pinjaman

- a. Memberikan kredit mikro terdiri dari: Kupedes Usaha dan Kupedes GBT.

b. Memberikan KUR (kredit usaha rakyat)

3. Usaha Jasa Bank

a. Pengiriman uang

b. Pembayaran gaji pensiunan

c. Transaksi ATM.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Kredit pada Bank BRI Unit Daeng Sirua

Didalam penelitian ini penulis membahas permasalahan mengenai ifektivitas pengendalian internal pemberian kredit, kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible).

1. Sasaran Kredit

- a. Golongan Pengusaha (Non GBT) Yaitu semua pengusaha yang bergerak diberbagai sektorekonomi yang ada dalam wilayah kerja Bri Unit, yang usahanya benar-benar layak untuk diberikan kredit atau pinjaman
- b. Golongan Berpenghasilan Tetap (GBT) GBT yang dapat dilayani antara lain:
 - a). Semua Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 Pegawai Negeri termasuk adalah :
 - b). Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Lembaga Negara, baik pusat maupun daerah yang diangkat berdasarkan peraturan pemerintah dengan tanpa membedakan SK pengangkatan dikeluarkan oleh BAKN atau non BAKN.
 - c). Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
 - d). Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- e). Pegawai Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Pegawai/karyawan tetap dari perusahaan swasta.
3. Pensiunan dari pegawai / pekerja golongan berpenghasilan tetap tersebut pada butir (2) diatas.
4. Pensiunan karyawan swasta yang instansinya mempunyai YDP, atau pensiunan pegawai lainnya yang menerima pensiun secara tetap dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang didirikan dengan ketentuan Menteri Keuangan.

B. Pemberian Putusan Kredit

Sebelum pemberian putusan kredit, pejabat pemutus kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberiaan putusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum

Uraian kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabat pengurus kepala unit sebagai berikut

1. Meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian SKPP yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa
2. Apabila menurut pejabat pemutus hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa tersebut sudah benar, pejabat pemutus dapat langsung memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal pejabat pemutus kepala unit merasa ragu atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksa pejabat Pemrakarsa, pejabat pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang.

4. Apabila telah diperiksa ulang oleh pejabat pemutus kepala unit ternyata jumlah kredit yang diberikan lebih kecil, sama atau lebih besar dari jumlah yang diusulkan pejabat pemrakarsa, maka terhadap SKPP tersebut harus diputus oleh pejabat setempat lebih tinggi maksimal pimpinan cabang dengan disertai alasan-alasan yang kuat.

Lama Proses Penyelesaian Skpp, Ditentukan

1. Lama penyelesaian SKPP sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan dan pemberitahuan keputusan kepada calon debitur, tidak boleh lebih dari 5 hari kerja
2. Untuk kondisi tertentu yang terkait dengan kondisi wilayah kerja antara lain kemudahan sarana transportasi, jarak dan waktu, tempuh. Maka proses kredit putusan pejabat dikantor cabang dapat dipertimbangkan lebih dari 5 hari kerja.

C. Prosedur Permohonan Kredit Pada BRI Daeng Sirua

1. Tahap pendahuluan

Calon debitur yang mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Daeng Sirua harus diwawancara oleh pejabat yang berwenang. Dalam wawancara ini wajib diberikan penjelasan kepada calon debitur, mengenai

- 1). Sektor-sektor kredit yang dapat dilayani oleh bank BRI unit Daeng Sirua.
- 2). Syarat-syarat perkreditan

- 3).Prosedur pemberian kredit lain-lain yang dianggap perlu (jenis kredit, bunga, provisi kredit, jangka waktu, cara penarikan atau pengembalian kredit)

2. Pengajuan permohonan kredit

Pengajuan permohonan kredit harus dilakukan secara tertulis oleh calon debitur baik melalui surat atau dengan cara mengisi formulir (formulir permohonan kredit usaha, formulir permohonan kredit penghasilan tetap, formulir surat kuasa memotong gaji, dll). Dokumen yang harus dilampirkan pada surat permohonan kredit adalah:

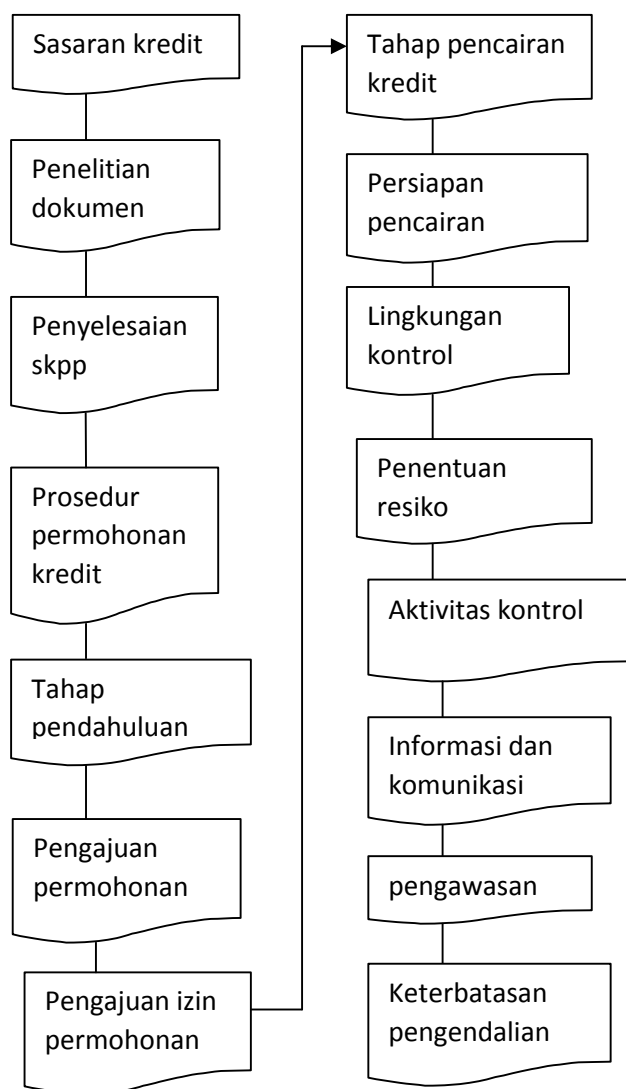
- 1). Identitas debitur, KTP
- 2). Identitas usaha debitur, antara lain Akta pendirian perusahaan beserta seluruh Akte perubahannya.
- 3). Bukti kepemilikan agunan atau akte lainnya, asli hak atas tanah yang diterbitkan oleh unik kerja.

3. Pengajuan Izin Permohonan Kredit

- 1). Seluruh permohonan kredit yang masuk dicatat oleh dokumen pada buku register permohonan kredit
- 2). Seluruh foto copy dokumen yang diterimah dari calon debitur harus dicocokkan dengan aslinya
- 3). Berdasarkan wawancara pendahuluan serta surat permohonan kredit yang dilampiri dengan dokumen dengan pendukungnya, maka pejabat Bank membuat permohonan izin proses yang disertai dengan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, maka segera dibuat

surat pemberitahuan kepada pemohon segera dibuatkan surat pemberitahuan kepada pemohon kredit (Formulir surat pemberitahuan penolakan kredit) sedangkan apabila izin proses disetujui oleh pejabat yang berwenang maka proses selanjutnya permohonan kredit tersebut dianalisis oleh mantri.

Flowcart penerimaan dan pencairan kredit



D. Administrasi Realisasi/Pencairan dan Kontrol Kredit

Dalam tahap pencairan kredit langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pencairan

Setelah SKPP diputus, Deskman mencatatnya pada register model 35 dan segera melaksanakan persiapan pencairan sebagai berikut:

- 1). Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan kredit telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya
- 2). Menyiapkan surat pengakuan hutang model SH
- 3). Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan agunan
- 4). Mempersiapkan dan menyelesaikan surat-surat pengikatan agunan sesuai putusan kredit.
- 5). Mempersiapkan surat permintaan penutupan asuransi untuk asuransi kerugian atas barang jaminan apabila didalam putusan syarat kredit mencantumkan syarat tersebut.
- 6). Mengisi kuitansi pencairan kredit

2. Lingkungan Kontrol (*Control Environment*)

Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal ini mencakup: etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen.

a. Penentuan Risiko (*Risk Assessment*)

Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus berkembang. Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. COSO juga menambahkan pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis.

b. Aktivitas Kontrol (*Control Activities*)

Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan.

c. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang operasi kontrol internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas control dan untuk mengelola operasinya.

d. Pengawasan (*Monitoring*)

Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen kontrol.

e. Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal menurut Mulyadi (2002:181), yaitu:

a. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

b. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah, membuat kesalahan karena kelalaian tidak adanya perhatian, kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

c. Kolusi

Tindakan bersama individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (*collusion*). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidak beresan atau tidak

terdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian yang dirancang.

d. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal.

E. Prinsip Kehati Hatian Dalam Menyalurkan Kredit Pada Bank Bri Daeng Sirua

Oleh karena itu penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar.

Manfaat pengendalian intern pemberian kredit pada BRI Daeng sirua, antara lain adalah untuk:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.

- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.

F. Manfaat analisis kredit

Manfaat analisis kredit yakni untuk penilaian kredit dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh lukman Dendawijaya bahwa analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak yang bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada PT. Bank BRI Unit Daeng Sirua Makassar, penulis menyimpulkan penerapan pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank BRI Unit Daeng Sirua dalam menunjang prosedur pemberian kredit cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Terpenuhinya unsur-unsur pengendalian internl, yaitu:
 - a. Adanya lingkungan pengendalian yang cukup baik sehingga personil dapat menerapkan pengendalian internl yang telah ditentukan oleh perusahaan.
 - b. Adanya kegiatan pengendalian didalam setiap pelaksanaan pemberian kredit.
 - c. Adanya pengawasan untuk penindak lanjutan kegiatan pengendalian yang dilakukan. Dan adanya tujuan dari pelaksanaan pengendalian internal pemberian kredit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT Bank Unit Daeng Sirua Makassar, yaitu sebagai berikut:

1. lebih ditingkatkan lagi pengawasan kepada debitur.
2. lebih ditingkatkan lagi pengawasan kepada debitur dalam aktivitas pemberian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2005, Management Control System. Edisi Kesebelas, Jilid Satu, Salemba Empat: Jakarta.
- Boynton W, C., Raymond N. Johnson., and Walter G. Kell, 2002, Modern Auditing. Edisi Ketujuh, Jilid Satu, Erlangga: Jakarta.
- Champion, Dean J., 1981, Basic Statistic for Social Research, Edisi 2, Cincinnati, Ohio, South-Western Publishing Co.
- Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi, 2010, Pengantar Manajemen Kredit. Cetakan Kesatu, Alfabeta: Bandung.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006. Dasar-dasar Perbankan. Cetakan Kelima, Bumi Aksara: Jakarta.
- [Http://adiprtm.dikti.net/mpi/MPI%20sess9.ppt](http://adiprtm.dikti.net/mpi/MPI%20sess9.ppt)
- [Http://www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)
- Kasmir, 2002. Dasar-dasar Perbankan. Edisi Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mulyadi, 2002. Auditing. Edisi Keenam, Jilid Satu, Salemba Empat: Jakarta.
- Suyatno, Thomas, dkk. 2003. Dasar-dasar Perkreditan. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sawyer, Lawrence B., Mortimer A. Dittenhofer., James H. Scheiner, 2005. Audit Internal Sawyer. Edisi Kelima, Jilid Satu, Salemba Empat: Jakarta.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2006, Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi panduan praktis mahasiswa, Bankir dan Nasabah, Cetakan keenam, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Welly (2015) Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit Pada Perbankan Syariah Dikota Palembang”.
- Putri oceana maharani dan I wayan ramantha (2014) “Pengaruh Efektivitas Struktur Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perkreditan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Dempasar”.
- Retno martanti E.L dan Masruroh (2015) “Peran Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Dalam Meminimalisasi Non Performing Loan Pada PT. Bank Mitra Niaga Tbk”

Zulkifli Lubis (2016) "Peranana Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internl Pemberian Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Medan".

Lukieto Cahyadi, SE, MM. STIE Bina Karya Tebing Tinggi (2014). "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi".

Made Oka Hari Setiawan dan Gede Saparta Wisadha (2014) "Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Bandung".

Mohammad Muzamil (2015) "Analisis Penerapan System Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Samarinda".

Maman Suherman (2008) "Peranan Sisitem Informasi Kredit Dalam Menunjang Pemberian Kredit Usaha Di PT.BRI (Persero) Cabang Banjar Unit Banjar".

DAFTAR LAMPIRAN WAWANCARA

NAMA INFORMAN	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
MIRA	Apa tujuan pengendalian internal di Bank Bri Daeng Sirua?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan keyakinan 2. Yang memadai kepada manajemen bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Keandalan dari informasi keuangan 3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 4. Efektivitas dan efisiensi operasi
	Bagaimana cara penetapan suku bunga dalam efektivitas pengendalian internal (kupedes)?	Tingkat Suku Bunga Penetapan suku bunga kupedes ditetapkan berdasarkan flate rate system yaitu bunga dihitung berdasarkan plafond kredit mula-mula dan dibebankan sepanjang jangka waktu, dengan besaran tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Apa Manfaat Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di Bank BRI Daeng Sirua?	<p>Manfaat pengendalian intern pemberian kredit, antara lain adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> g. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman. h. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan sesuai cara atau tidak. i. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah. j. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan. k. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan alisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak

		<p>terulang kembali.</p> <p>i. Mengetahui posisi persentase <i>collectability credit</i> yang disalurkan bank</p>
	<p>Bagaimana peranan perkreditan dalam bank BRI Daeng Sirua?</p>	<p>Peranan kredit dalam operasi bank sangat besar/penting, karena sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi perkreditan. Maka untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan yang baik dan pengendalian internal yang efektif dan efisien.</p> <p>Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yang paling besar dalam memberikan kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran kredit</p>
	<p>Bagaimana cara pengolahan Bunga Pinjaman?</p>	<p>Pengembalian Bunga Tepat Waktu</p> <p>PBTW merupakan dana yang diperhitungkan dan dipungut dari angsuran bunga kupedes debitur dan akan dibayarkan kembali kepada debitur.</p> <p>PBTW juga merupakan dana cadangan untuk akhir bagi debitur yang mengangsur kupedes tidak sesuai dengan jadwal angsuran yang telah diperjanjikan (tidak tepat waktu). Apabila debitur membayar angsuran pokok bunga kupedesnya selalu tertip dan tepat waktu, maka PBTW yang telah dibentuk dikembalikan kepada debitur.</p> <p>PBTW diberlakukan untuk kupedes dengan jenis penggunaan plafond tertentu yang diatur dengan ketentuan tersendiri.</p>

	<p>Apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet?</p>	<p>Debitur yang tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai kesadaran untuk membayar kewajibannya atau utangnya.</p> <p>a. Menurunnya usaha debitur yang akan menyebabkan turunya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.</p> <p>b. Adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan harga atau biaya-biaya dan lain sebagainya.</p> <p>Dan Adanya Pemutusanhubungan kerja (PHK) yang menyebabkan debitur tidak dapat membayar kreditnya</p>
	<p>Siapakah yang menjadi sasaran kredit</p>	<p>1. GolonganPengusaha (Non GBT) Yaitu semua pengusaha yang bergerak diberbagai sektor ekonomi yang ada dalam wilayah kerja Bri Unit, yang usahanya benar-benar layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Dan Golongan Berpenghasilan Tetap</p> <p>2. Pegawai/karyawan tetap dari perusahaan swasta.</p> <p>3. Pensiunan dari pegawai / pekerja golongan berpenghasilan tetap tersebut pada butir (2) diatas.</p> <p>4. Pensiunan karyawan swasta yang instansinya mempunyai YDP, atau pensiunan pegawai lainnya yang menerima pensiun secara tetap dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang didirikan dengan ketentuan Menteri Keuangan.</p>
	<p>Dokumen apa saja yang wajib diperhatikan dalam pemberian putusan kredit</p>	<p>1. Meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian SKPP yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa</p> <p>2. Apabila menurut pejabat</p>

	<p>DAFTAR LAMPIRAN</p>	<p>putusan hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa tersebut sudah benar, pejabat pemutus dapat langsung memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Dalam hal pejabat pemutus kepala unit merasa ragu atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa, pejabat pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang.</p> <p>4. Apabila telah diperiksa ulang oleh pejabat pemutus kepala unit ternyata jumlah kredit yang diberikan lebih kecil, sama atau lebih besar dari jumlah yang diusulkan pejabat pemrakarsa, maka terhadap SKPP tersebut harus diputus oleh pejabat setempat lebih tinggi maksimal pimpinan cabang dengan disertai alasan-alasan yang kuat.</p>
--	-------------------------------	---

RIWAYAT HIDUP



KISRAWATI ASJUDALASTRI, Lahir di Bontoparang 20 Juni 1996. Penulis adalah anak sulung dari 3 bersaudara, Buah hati dari H.Lahoddin dan Ny Te'ne. penulis memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2000 di SD Inpres Bontoparang, lalu lanjut di Madrasah Tsanawiyah Saroppo pada tahun 2006, setelah tamat penulis melanjutkan

pendidikan di SMA Negeri 6 Jeneponto. Setelah tamat dibangku SMA penulis melanjutkan pendidikannya ke Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan Alhamdulillah berkas pertolongan dan petunjuk Allah SWT penulis insyaallah melalui semua ujian yang ditempuh selama menempuh pendidikan.dan do'a dari orang tualah yang memudahkan jalannya insyaallah termasuk dalam menyusun skripsi ini.